

TESIS

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM PELAPORAN
PEMILIK MANFAAT PADA PROSES
PENUTUPAN PERSEROAN TERBATAS YANG
TELAH DINYATAKAN PAILIT**



Diajukan Oleh :
NASRON AD
NIM. 2320216310029

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN
TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2025**

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM PELAPORAN PEMILIK
MANFAAT PADA PROSES PENUTUPAN PERSEROAN
TERBATAS YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT**

Tesis

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Ilmu Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh :
NASRON AD
NIM. 2320216310029**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN
TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2025**

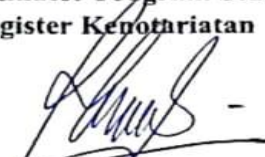
Tesis ini
telah Diperiksa dan Disetujui
pada tanggal.....

PEMBIMBING



Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 19831201 200604 1 002

Diketahui oleh
Koordinator Program Studi
Magister Kenotriatan



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2002

Diketahui oleh
Dean Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nasron AD, S.H.
NIM : 2320216310029
Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat
Judul Tesis : KEWENANGAN NOTARIS DALAM
PELAPORAN PEMILIK MANFAAT PADA
PROSES PENUTUPAN PERSEROAN TERBATAS
YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiarisme;
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2025
Yang membuat Pernyataan



Nasron AD, S.H.



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Diberikan kepada

NASRON AD
2320216310029

Telah dilakukan Pengecekan uji Kemiripan Tugas Akhir dengan indeks sebesar :

11 %

Banjarmasin, 26 Juni 2025

Mengetahui,
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



[Signature]
Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM

[Signature]
Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

RINGKASAN

KEWENANGAN NOTARIS DALAM PELAPORAN PEMILIK MANFAAT PADA PROSES PENUTUPAN PERSEROAN TERBATAS YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT

Oleh :

Nasron AD¹, Mirza Satria Buana²

Kewenangan Notaris dalam melaporkan pemilik manfaat pada proses penutupan Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan pailit, didapat dengan dasar surat kuasa dari Kurator, tetapi dalam perjalanannya Notaris tidak mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan pengurusannya, dikarenakan faktor ketiadaan data-data pemilik manfaat, Sistem pelaporan pemilik manfaat di AHU yang tidak mampu memberikan akses, dan Perpres No 13 tahun 2018 Pasal 22 ayat (2) hanya menyebutkan likuidator/kurator wajib untuk menatausahakan dokumen pemilik manfaat pada Korporasi bubar tetapi tidak mengatur jelas bagaimana mekanisme pelaporannya, terlebih lagi di dalam Permenkumham No 15 Tahun 2019 yang notabennya tentang tatacara melaporkan pemilik manfaat, juga tidak menjelaskan tentang teknis pelaporan pemilik manfaat pada proses penutupan perseroan terbatas yang telah pailit. Sehingga mengakibatkan Notaris dalam melakukan pengurusan tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang nyata.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dilaksanakannya kewenangan notaris dalam melaporkan pemilik manfaat pada proses penutupan perseroan terbatas yang telah pailit, sejauh mana Peraturan Perundang-undangan yang terkait yang memberikan akses kepada Notaris dalam melaporkan pemilik manfaat pada konteks penutupan perseroan terbatas yang telah pailit, dan apa-apa saja yang menjadi faktor kendala bagi Notaris, serta menganalisa akibat hukum dengan pendekatan teori-teori dan pendapat praktisi hukum yakni kurator dan Notaris.

Secara teori dan Pendapat praktisi hukum yakni Kurator dan Notaris terbitnya Perpres No 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No 15 Tahun 2019 tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang nyata terhadap pengurusan pelaporan pemilik manfaat pada proses penutupan perseroan terbatas yang telah dinyatakan pailit. Dengan demikian, perlu dilakukannya Revisi terhadap Perpres No 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No 15 tahun 2019, dan memperbaiki sistem AHU terkait pelaporan pemilik manfaat pada proses penutupan perseroan terbatas yang telah dinyatakan pailit.

¹ NIM : 2320216310029

² Pembimbing

KEWENANGAN NOTARIS DALAM PELAPORAN PEMILIK MANFAAT PADA
PROSES PENUTUPAN PERSEROAN TERBATAS YANG TELAH
DINYATAKAN PAILIT

ABSTRAK

Oleh :

Nasron AD,¹ Mirza Satria Buana²

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Kata Kunci : Notaris, Pelaporan Pemilik manfaat, Penutupan Perseroan Terbatas yang Pailit

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum dari pelaksanaan Notaris dalam melakukan pelaporan pemilik manfaat pada proses penutupan perseroan terbatas yang telah pailit, serta menganalisis akibat hukum dari faktor-faktor kendala dari ketiadaan data pemilik manfaat dan kendala ketidakjelasan peraturan perundang-undangan terkait pelaporan pemilik manfaat pada pada proses penutupan perseroan terbatas yang telah pailit. Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, penelitian ini bersifat preskriptif yaitu dengan menjawab isu hukum dengan cara mengkaji secara mendalam, dan memberikan penjelasan secara tepat dan menganalisa peraturan perundang-undangan dan teori-teori serta pendapat praktisi hukum dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Hasil dari penelitian ini yakni *Pertama* : Pemilik manfaat diartikan orang perseorangan yang menerima manfaat dari suatu korporasi baik langsung ataupun tidak langsung. Terkait pelaporan terhadap pemilik manfaat terdiri dari, pendaftaran, menjalankan usaha, perubahan, dan pengkinian. Terhadap pembubaran hanya disebutkan dalam Perpres No 13 tahun 2018 dan tidak ada penjelasan lebih lanjut, terlebih lagi di dalam Permenkumham No 15 Tahun 2019 yang notabeneanya mengatur tata cara pelaporan pemilik manfaat, juga tidak mengatur bagaimana mekanisme pelaporan pemilik manfaat pada proses penutupan perseroan terbatas yang telah pailit. *Kedua* : Kurator berdasarkan Surat kuasa dapat memberikan kewenangan kepada Notaris untuk melakukan pengurusan pelaporan informasi pemilik manfaat sebelum dilakukannya penutupan perseroan terbatas yang pailit. Di samping itu, secara teori Perpres No 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No 15 Tahun 2019 tidak dapat memberikan kepastian hukum yang nyata. Selanjutnya, menurut Kurator dan Notaris dalam praktiknya secara normatif Perpres No 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No 15 Tahun 2019 terkait pelaporan pemilik manfaat pada perseroan terbatas yang pailit, tidak dapat memberikan kepastian hukum yang jelas.

¹ NIM : 2320216310029

² Pembimbing

**NOTARY'S AUTHORITY IN REPORTING BENEFICIAL OWNER IN THE
PROCESS OF CLOSING OF LIMITED LIABILITY COMPANY
WHICH HAS BEEN DECLARED BANKRUPT**

By

Nasron AD¹, Mirza Satria Buana²

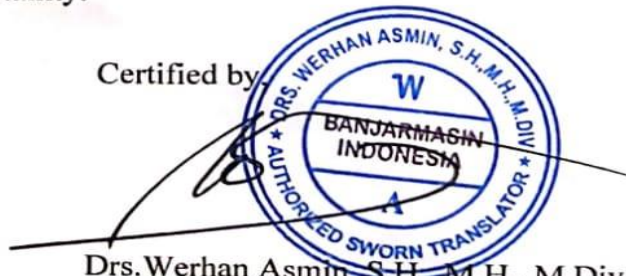
Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 110 pages

ABSTRACT

Keywords: Notary, Report on Beneficial Owner, Closing of Bankrupt Limited Liability Company

The goals of this research are to analyze legal certainty of the implementation by the Notary in conducting reporting on beneficial owner in the process of closing of limited liability company which has been declared bankrupt, and to analyze the legal consequence from the obstacle factors due to the non-existence of data on beneficial owner and the problems of vagueness of legislation related to reporting of beneficial owner in the process of closing of limited liability company which has been declared bankrupt. This is normative legal research, the characteristic of the research is prescriptive. The results of the research are firstly, the beneficial owner is an individual person who gets benefit from a corporation directly or indirectly. Reporting on beneficial owner consists of registration, running the business, changes, and updating. On the dissolution it is merely mentioned in Presidential Regulation Number 13 of 2018 and there is no further elucidation, furthermore in Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 15 of 2019 concerning procedure of reporting beneficial owner, it does not either regulate how the mechanism of reporting beneficial owner in the process of closing of limited liability company which has been declared bankrupt. *Secondly*, the curator based on Power of Attorney can grant authority to the Notary to perform arrangement of reporting on information on the beneficial owner before the implementation of closing of bankrupt limited liability company. Besides, theoretically, Presidential Regulation Number 13 of 2018 and Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 15 of 2019 cannot provide real legal certainty. Furthermore, according to curator and notary, in practice, normatively the two regulations cannot give clear legal certainty.

Certified by



Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div.
Authorized Sworn Translator

¹ Student number: 2320216310029

² Supervisor

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan anugrahnya sehingga akhirnya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir Tesis ini dengan judul **“KEWENANGAN NOTARIS DALAM PELAPORAN PEMILIK MANFAAT PADA PROSES PENUTUPAN PERSEROAN TERBATAS YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT”**.

Pada penelitian Tesis ini tentu masih banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan, hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan penulis yang dimiliki. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas kekurangan tersebut, penulis juga sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan Tesis ini.

Sehingga dalam penyusunan Tesis ini, penulis mendapatkan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak. Untuk itu perkenalkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Orang tua penulis, yakni Bapa Julkarnen dan Almarhuma Ibu, Sarmini. Terimakasih yang tak terhingga yang telah memberikan dukungan, motivasi, do'a, semangat, perhatian dan biaya selama diperantauan serta biaya di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat hingga menyelesaikan Tesis.
2. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. Selaku ketua Program Studi Magister Konotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

4. Bapak Prof. Mirza Satria Buana S.H., M.H., Ph.D. Selaku Dosen pembimbing, terimakasih atas bimbingan dan perhatiannya kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir Tesis.
5. Kepada Bapak/Ibu Dosen Penguji. yang memberikan masukan, saran dan koreksi atas penulisan tesis ini.
6. Seluruh Dosen pengasuh mata kuliah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
7. Para Staf Akademik Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan bantuannya kepada penulis untuk mengurus segala keperluan administrasi selama penulis kuliah.
8. Teman-Teman All-Star yang telah kebersamai menimbah ilmu di Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat.
9. Teman-Teman di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 23 dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis.

Akhirnya penulis panjatkan do'a kepada Allah SWT semoga karunia dan anugerah yang diberikan senantiasa menyertai kita dan mudah-mudahan Tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Banjarmasin, Juli 2025



Nasron AD, S.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	iv
RINGKASAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
DFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	14
F. Tinjauan Pustaka.....	15
1. Kerangka Konseptual.....	15
a. Hakikat Jabatan Notaris.....	15
b. Pembubaran dan Pengakhiran Perseroan Terbatas	19
c. Prinsip Hukum Kepailitan	23
d. Pemilik Manfaat (beneficial ownership).....	30
2. Kerangka Teori.	35
a. Teori Kepastian Hukum.....	35
b. Teori Jabatan.....	39
G. Metode Penelitian	41
1. Jenis Penelitian	41
2. Tipe Penelitian	42
3. Sifat Penelitian.....	42

4. Pendekatan Penelitian	43
5. Jenis Bahan Hukum	44
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	46
7. Pengelolaan dan Analisa Bahan Hukum.....	46
H. Sistematika Penulisan	47
BAB II PENGATURAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PELAPORAN PEMILIK MANFAAT PADA PROSES PENUTUPAN PERSEROAN TERBATAS YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT	48
A. Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat.	50
B. Pelaporkan Informasi Pemilik Manfaat pada Perseroan Terbatas.	58
C. Kewenangan Notaris Melaporkan Pemilik Manfaat pada proses penutupan Perseroan Terbatas yang telah Pailit.....	69
BAB III TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PELAPORAN PEMILIK MANFAAT PADA PROSES PENUTUPAN PERSEROAN TERBATAS YANG TELAH PAILIT	77
A. Identifikasi Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaporan Informasi Pemilik Manfaat Pada Proses Penutupan Perseroan Terbatas Yang Telah Pailit.	80
B. Justifikasi Ketidakmampuan Instrumen Hukum Dalam Mengakomodir Pelaporan Informasi Pemilik Manfaat pada Proses Penutupan Perseroan Terbatas Yang Telah Pailit.	93
C. Pendapat Praktisi Hukum Kurator dan Notaris terhadap Pelaporan Informasi Pemilik Manfaat Pada Proses Penutupan Perseroan Terbatas Yang Telah Pailit.	103
BAB IV PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	